



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sudarmono Toana bin Imran Toana, tempat dan tanggal lahir Dalapuli, 07 desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pengusaha mebel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I;

Kartina Van Gobel binti Onggo Van Gobel, tempat dan tanggal lahir Buko, 28 oktober 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua anak para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tertanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon, yang beridentitas:

Nama : Nur Fajra Toana Binti Sudarmono Toana
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Dusun II, Desa Tombulang Pantai, Kec. Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Rizky Razak Bin Ramli Razak
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Angkutan
Alamat : Dusun III, Desa Buko Utara, Kec. Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
No Telp : 082189285292

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan saat ini anak para pemohon yang bernama Nur Fajra Toana Binti Sudarmono Toana telah hamil 2 bulan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia Perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Nur Fajra Toana Binti Sudarmono Toana) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Rizky Razak Bin Ramli Razak);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami dan Orang Tua Calon suami Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk nomor B.194/Kua.23.08.06/PW.00/09/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman tanggal 03 Oktober 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanpa tanggal, bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 710806071280002 atas nama Sudarmono Toana, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7108066810830002 atas nama Kartina Van Gobel, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberitanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-04122011-0024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil tanggal 4 Desember 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108062003110060 atas nama Kepala Keluarga Sudarmono Toana, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 14 Juli 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberitanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7108062001890001 atas nama Rizky Razak yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinogaluman atas nama Nur Fajra Toana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 28 Mei 2019, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin Nomor : 440/PKM-BK/BMU/715/X/2022 yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa Puskesmas Buko Kecamatan Pinogaluman, tanggal 4 Oktober 2022 dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Iskandar Gobel bin Onggo Van Gobel**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tombulang, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nur Fajra Toana;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SMA;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Rizky Razak sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri karena anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah mempunyai usaha sendiri berupa rental Playstation dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Nur Fajra Toana dan Rizky Razak;

2. Karmila Tabuan binti Mansur Tabuan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer pada SD Negeri 1 Tuntung Timur, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Buko Utara, Kecamatan Pinogaluan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai kakak dari calon suami anak para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya namun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nur Fajra Toana;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus sekolah tingkat SMA;
- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon sudah berhubungan terlalu dekat sampai melanggar hukum agama dengan laki-laki bernama Rizky Razak sehingga itu orangtua keduanya segera akan menikahkan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri karena anak para Pemohon sudah hamil;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah mempunyai usaha sendiri berupa rental PS dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami sudah siap untuk menikahkan Nur Fajra Toana dan Rizky Razak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon aga pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama Nur Fajra Toana untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizky Razak karena Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang di maksud Pasal 12 ayat (1) dan(2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda menikahkan anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami, dan orang tua calon suami, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan calon suaminya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan telah sejak tahun 2020 sampai sekarang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak, Para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Para Pemohon sudah melakukan pelanggaran agama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah bermeterai, *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, karena bukti P.1, sampai dengan P.8 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan substansi semua surat-surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.6 berupa fotokopi Kartu

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nur Fajra Toana merupakan anak ke satu perempuan dari para Pemohon, yang dilahirkan pada 20 Agustus 2004 sehingga sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa asli Pemberitahuan penolakan Kehendak Kawin rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun ditolak karena Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Nur Fajra Toana dengan laki-laki yang bernama Rizy Razak namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat, kedua saksi mengetahui alasan para Pemohon akan menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena anak para Pemohon dan calon suami telah terlanjur melakukan hubungan yang dilarang agama dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan juga dengan bukti P.8 berupa keterangan Kesehatan pasangan pengantin, maka harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan anak para Pemohon dan calon suami mendapatkan rekomendasi Kesehatan fisik

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jiwa dari Puskesmas Buko Kecamatan Pinogaluman untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah pula menerangkan anak para Pemohon lulus SMA sedangkan calon suami anak para Pemohon beragama Islam, berstatus belum menikah dan telah mempunyai usaha rental Playstation sendiri dan dikuatkan pula dengan bukti P.7 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.7 dan P.6 harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon sudah lulus SMA sedangkan calon suami anak para Pemohon beragama Islam, belum menikah dan mempunyai rental Playstation dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman telah menolak melangsungkan perkawinan antara Nur Fajra Toana dan Rizky Razak bin Ramli Razak karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon Nur Fajra Toana lahir pada tanggal 20 Agustus 2004 atau masih berumur 18 tahun 2 bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka hingga telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga anak para Pemohon telah hamil;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah lulus SMA sedangkan calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan masih jejak dan mempunyai rental Playstation dengan penghasilan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suami mendapatkan rekomendasi Kesehatan fisik dan jiwa dari Puskesmas Kecamatan Pinogaluman untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalin hubungan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga keduanya telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan, karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga para Pemohon khawatir keduanya akan terus melakukan perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat dan telah siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizahinsaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikandispensasi anak Para Pemohon bernama Nur Fajra Toana binti Sudarmono Toana untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rizky Razak bin Ramli Razak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nur Fajra Toana binti Sudarmono Toana** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rizky Razak bin Ramli Razak**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000.00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan didampingi oleh Abdul Muis Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Muis Ali, S.Ag

Royana Latif, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.196/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)